

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dan teoretis mengenai manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam meningkatkan kinerja guru. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada empat fungsi utama manajemen SPMI, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian mutu, yang diimplementasikan secara sistematis melalui siklus PPEPP. Seluruh konsep, teori, dan kebijakan yang dikaji diarahkan untuk memperkuat pemahaman terhadap indikator-indikator kinerja guru sebagai objek utama penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Prinsip dasar pengelolaan mutu dalam pendidikan berakar pada pandangan bahwa sekolah merupakan lembaga pembelajar (learning organization) yang terus tumbuh dan bertransformasi. Pendidikan tidak berhenti pada pemenuhan standar administratif, tetapi berorientasi pada pembentukan insan pembelajar yang unggul dan berkarakter. Dalam konteks ini, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai wujud kesadaran kolektif lembaga pendidikan untuk secara berkelanjutan melakukan evaluasi, refleksi, dan perbaikan diri.

Secara teori, SPMI sangat dekat dengan prinsip-prinsip TQM (Total Quality Management) yang menekankan keterlibatan warga sekolah, perencanaan yang terstruktur, pengendalian proses dan pengambilan keputusan berdasarkan data.

Landasan filosofis SPMI berpijak pada nilai humanisme dan konstruktivisme, yang meyakini bahwa setiap guru dan tenaga kependidikan memiliki potensi untuk berkembang. Sekolah bertanggung jawab menyediakan lingkungan yang memungkinkan proses pembelajaran profesional bagi guru melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan.

Selain itu, teori organisasi menyebutkan bahwa mutu pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh input, tetapi oleh manajemen proses (Fullan, 2014), kolaborasi antar tim (Hargereves & O'Connor, 2018), serta kepemimpinan transformasional kepala sekolah yang mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas guru.

Dengan demikian, implementasi SPMI bukan sekadar prosedur administratif, melainkan manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Perencanaan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan tahapan awal yang menentukan arah peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dalam konteks penelitian ini, perencanaan SPMI dipahami sebagai proses penetapan standar mutu, tujuan mutu, serta perencanaan program yang mencakup sumber daya manusia, pembiayaan, metode, dan media pembelajaran. Perencanaan tersebut menjadi dasar bagi guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang bermutu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sekolah.

2. Landasan Sistem Nilai

SPMI dibangun di atas sistem nilai yang mencerminkan integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap mutu pendidikan. Nilai-nilai utama yang mendasarinya meliputi kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kerja sama, serta penghargaan terhadap keberagaman. Dalam praktiknya, nilai-nilai ini menjadi fondasi terbentuknya budaya mutu di sekolah, di mana setiap warga sekolah; baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan memiliki tanggung jawab kolektif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Budaya mutu tidak akan terwujud tanpa adanya internalisasi nilai-nilai dalam perilaku profesional sehari-hari. Guru yang berintegritas akan berupaya melaksanakan pembelajaran yang bermutu; kepala sekolah yang bertanggung jawab akan menumbuhkan iklim kerja yang mendukung kolaborasi; sementara tim penjamin mutu sekolah akan berkomitmen menjaga keberlanjutan proses PPEPP (Perencanaan,

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan demikian, sistem nilai dalam SPMI menjadi motor penggerak terwujudnya kinerja guru yang optimal dan profesional.

Landasan Sistem Nilai pada penelitian ini merujuk pada Sistem Nilai yang dikemukakan oleh Achmad Sanusi dalam Endang Komara, Et, al (2025:46) yaitu (1) Nilai teologis, yang tercermin antara lain dalam Ketuhanan Yang Maha Esa, Rukun Iman, Rukun Islam, ibadah, tauhid, ihsan, istighfar, doa, ikhlas, tobat, ijtihad, khusyu', istikamah, dan jihad fi sabilillah; (2) Nilai etis hukum, yang terwujud antara lain dalam hormat, baik/rendah hati, setia, dapat dipercaya, jujur, bertanggungjawab, iktikad baik, setia-adil, damai, sabar, memaafkan, menolong, toleransi, dan harmonis; (3) Nilai estetik, yang termewujud antara lain dalam bagus, bersih, indah, cantik, manis, menarik, serasi, romantik, dan cinta kasih; (4) Nilai logis-rasional, yang mewujud antara lain dalam logika/cocok antara fakta & kesimpulan, tepat, sesuai, jelas, nyata, identitas/ciri, proses, keadaan/ kesimpulan cocok; (5) Nilai fisik fisiologik yang mewujud jelas unsur-unsurnya, fungsinya, perubahannya, ukuran-ukurannya, lokasinya, kekuatannya, asal-usulnya, sebab akibatnya; (6) Nilai teleologik yang terwujud dalam berguna, bermanfaat, sesuai fungsinya, berkembang/ maju, teratur/disiplin, integratif, produktif, efektif, efisien, akuntabel, inovatif

3. Landasan Kebijakan

Landasan kebijakan penelitian ini berpedoman pada regulasi nasional yang mengatur penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan, antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 35 menyatakan bahwa mutu pendidikan dijamin untuk meningkatkan martabat dan kualitas bangsa. Hal ini menjadi dasar filosofis bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan sistem penjaminan mutu.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (jo. PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), menegaskan bahwa satuan pendidikan wajib memenuhi atau melampaui SNP sebagai dasar pengembangan sistem penjaminan mutu.
- c. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mengatur secara komprehensif tentang pelaksanaan SPMI dan SPME serta menekankan peran aktif sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.
- d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, yang mendukung upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik serta profesionalisme guru.

Seluruh kebijakan tersebut menjadi dasar legal dan normatif pelaksanaan SPMI di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja guru dan mutu pendidikan.

4. Teori manajemen Mutu Dalam Pendidikan (TQM)

TQM merupakan teori yang relevan dengan implementasi SPMI. Prinsip utama TQM adalah :

- a. Fokus pada pelanggan (dalam Pendidikan pelanggan yang dimaksud adalah peserta didik, orang tua, Masyarakat)
- b. Keterlibatan seluruh warga organisasi
- c. Pendekatan proses dalam perbaikan mutu
- d. Pengambilan keputusan berbasis data
- e. Perbaikan berkelanjutan

Siklus perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan perbaikan (PDCA), menurut Deming (1986), membangun kualitas. Siklus ini serupa dengan siklus PPEPP dalam SPMI. TQM digunakan di sekolah untuk:

- a. Memastikan pembelajaran bermutu
- b. Meningkatkan kemampuan guru
- c. Memperkuat tanggung jawab kepala sekolah
- d. Membangun budaya mutu
- e. Mempertahankan peningkatan mutu yang konsisten

Oleh karena itu, Total Quality Management (TQM) merupakan landasan teoretis yang sangat relevan dan mendukung penelitian tentang manajemen SPMI serta kinerja guru.

5. Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sekolah melakukan sejumlah prosedur sistematis yang dikenal sebagai SPMI untuk memastikan bahwa semua layanan pendidikan memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Sesuai Permendikbud No. 28 Tahun 2016, SPMI dilaksanakan melalui lima tahap yang dikenal dengan Siklus PPEPP, yaitu :

- a. Penetapan standar mutu (P)
Sekolah menetapkan standar mutu sebagai target kinerja, merujuk pada SNP dan kebutuhan sekolah
- b. Pelaksanaan standar (P)
Warga sekolah melaksanakan standar yang telah ditetapkan dalam kegiatan pembelajaran, manajemen dan layanan pendidikan
- c. Evaluasi pelaksanaan standar (E)
Sekolah melakukan evaluasi keterlaksanaan standar melalui instrument seperti evaluasi diri sekolah (EDS), supervise, observasi kelas dan rapat mutu
- d. Pengendalian mutu (P)
Pengendalian dilakukan melalui monitoring, supervise, analisis kesenjangan mutu dan tindak lanjut terhadap temuan evaluasi
- e. Peningkatan mutu (P)
Sekolah merumuskan strategi perbaikan berdasarkan evaluasi dan pengendalian termasuk pelatihan guru, RKS dan peningkatan sarana pembelajaran.

Untuk merumuskan strategi perbaikan, SPMI membutuhkan partisipasi warga sekolah, kepemimpinan yang efektif, dan budaya kualitas.

6. Rapor Pendidikan Sebagai Instrumen Evaluasi Mutu

Rapor Pendidikan merupakan instrumen resmi evaluasi mutu pendidikan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai bagian dari kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD). Rapor Pendidikan menyajikan informasi komprehensif mengenai capaian mutu satuan pendidikan yang bersumber dari hasil Asesmen Nasional, meliputi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, Survei Lingkungan Belajar, serta data administratif pendidikan.

Dalam konteks Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rapor Pendidikan berfungsi sebagai dasar pemetaan mutu sekolah pada tahap evaluasi dalam siklus PPEPP. Data yang disajikan dalam Rapor Pendidikan dimanfaatkan oleh satuan pendidikan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mutu pendidikan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Evaluasi dan pengendalian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan upaya sistematis untuk menilai ketercapaian standar mutu serta menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, evaluasi SPMI dipahami sebagai proses reflektif yang memberikan umpan balik terhadap kinerja guru, baik melalui supervisi akademik maupun pemanfaatan data mutu seperti Rapor Pendidikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan kinerja guru secara berkelanjutan.

Berbeda dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang bersifat internal dan berbasis persepsi, Rapor Pendidikan menggunakan data terstandar secara nasional sehingga memiliki tingkat objektivitas dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Rapor Pendidikan

menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan strategis sekolah, termasuk dalam perencanaan program peningkatan kinerja guru, pelaksanaan supervisi akademik, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).

Dengan demikian, penggunaan Rapor Pendidikan dalam pelaksanaan SPMI di sekolah diharapkan mampu memperkuat budaya mutu, meningkatkan efektivitas siklus PPEPP, serta mendorong peningkatan kinerja guru secara sistematis dan berkelanjutan.

7. Kinerja Guru

Permendikdas Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru menyatakan bahwa kinerja guru dapat dilihat melalui empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan professional. Kompetensi-kompetensi tersebut menjadi tolak ukur kualitas proses pembelajaran yang dilakukan guru.

Kinerja guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas professional. Menurut Uno (2014), kinerja guru dapat diukur dari tiga aspek :

- a. Perencanaan Pembelajaran, meliputi kemampuan Menyusun RPP, bahan ajar, pemetaan kompetensi, asesmen dan strategi pembelajaran
- b. Pelaksanaan Pembelajaran, yaitu kemampuan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran secara interaktif, menyenangkan dan memotivasi peserta didik
- c. Evaluasi Pembelajaran, yaitu kemampuan guru merancang, melaksanakan, menindaklanjuti penilaian untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Menurut Gibsin (2012) dan Mulyasa (2013), kinerja guru dipengaruhi oleh berbagai factor internal maupun factor internal. Factor-faktor tersebut meliputi :

- a) Kompetensi Profesional,

Semakin tinggi tingkat profesional guru, maka semakin baik pembelajaran yang dihasilkan

b) Supervisi Akademik,

Supervisi yang baik dapat membantu guru memperbaiki strategi pembelajaran dan pemetaan asesmen.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan tahap implementasi standar mutu yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Dalam praktiknya, pelaksanaan SPMI tercermin dalam aktivitas pembelajaran guru, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup dan tindak lanjut pembelajaran. Oleh karena itu, pelaksanaan SPMI dalam penelitian ini dikaitkan secara langsung dengan praktik kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu dan berorientasi pada standar pendidikan.

c) Budaya Mutu,

Budaya sekolah yang positif dapat mendorong guru untuk bekerja lebih baik dan juga kolaboratif

d) Kepemimpinan Kepala Sekolah,

Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh besar terhadap motivasi, disiplin, dan peningkatan kompetensi guru.

Pengorganisasian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berkaitan dengan pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab seluruh warga sekolah dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Pengorganisasian yang efektif ditandai dengan adanya struktur penjaminan mutu sekolah, kejelasan peran kepala sekolah, guru, dan tim penjamin mutu, serta koordinasi yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, pengorganisasian SPMI dipandang sebagai faktor penting yang memengaruhi keterlibatan dan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.

e) Implementasi SPMI.

SPMI memberikan pedoman, standar dan mekanisme evaluasi yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan kualitas praktik mengajar.

SPMI berperan meningkatkan profesionalisme guru melalui siklus PPEPP yang menghasilkan perbaikan proses pembelajaran.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) belum sepenuhnya berjalan optimal di banyak satuan pendidikan dasar dan menengah. Hamidatul Ula dan M. Yunus Abu Bakar (2021) menemukan bahwa pelaksanaan SPMI di tingkat sekolah menengah pertama masih menghadapi kendala, terutama pada tahap evaluasi dan tindak lanjut hasil mutu. Sementara itu, Romadlon dkk. (2022) menegaskan bahwa keberhasilan penerapan SPMI sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, efektivitas struktur tim penjamin mutu, serta pemanfaatan data mutu sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Temuan-temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa perencanaan yang berbasis data, pengorganisasian yang terstruktur, serta pelaksanaan siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan kinerja guru dan mutu pembelajaran.

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana manajemen SPMI yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian. Diimplementasikan di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung, serta sejauh mana penerapan tersebut berperan dalam meningkatkan kinerja guru secara berkelanjutan.

Selain itu, sejumlah penelitian cenderung berfokus kepada pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru, bukan pada bagaimana proses manajerial SPMI secara utuh.